

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Bergulirnya masa pemerintahan orde lama menuju orde baru dan hingga kini berada pada era reformasi membawa arus pembangunan yang sangat deras bagi Indonesia. Berbagai praktik kebijakan dihadirkan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan yang berkesinambungan menuju taraf hidup yang lebih baik (Tjokrowinoto, 1996:1)

Pembangunan sangat berkaitan dengan nilai, dan acap kali bersifat transendental, suatu gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah ideologi (*the ideology of developmentalisme*). Oleh karenanya, para perumus kebijakan, perencana pembangunan, serta para pakar selalu dihadapkan nilai (*value choice*), mulai pada pilihan epistemologis-ontologi sebagai kerangka filosofisnya, sampai pada derivasinya pada tingkat strategi, program, atau proyek. Maka dari itu, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi (Budiman, 1995: 1-2).

Berkaitan dengan pemerataan kebijakan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan nasional, sektor pertanian menjadi unit ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. Pertanian menjadi penghidupan dari sebagian besar masyarakat, di mana wilayah pertanian hampir seluruhnya terletak di daerah pedesaan, maka pembangunan kawasan setingkat desa hanya mungkin terjadi jika terdapat pembangunan pertanian (Birowo, 1979:13)

Pertanian yang pada awalnya sebagai mode produksi subsisten berubah menjadi produk untuk dijual dalam sistem pasar. Produksi pertanian bertujuan untuk memperoleh uang. Buku *Theories of Development*, Richard Feet dan Elaine Hartwick menerangkan tentang strategi dalam pertanian berpendapat kemajuan di bidang pertanian dianggap penting untuk menyediakan pangan dan bahan baku, menghasilkan tabungan dan pendapatan pajak, untuk pembangunan di sektor lain dalam perekonomian, mendapatkan devisa, dan membentuk pasar untuk barang-barang industri. Hubungan antar sektor, antara industri dan pertanian akan menentukan arah transformasi struktural dalam ekonomi yang sedang berkembang (Peet, Hartwick:1999:44).

Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini sektor pertanian menjadi sorotan prioritas pembangunan nasional. Peranan sektor pertanian yaitu sebagai sumber bahan kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tanaman pangan, dan tanaman bahan baku industri menjadi salah satu sektor yang dapat mendukung perekonomian di Indonesia, seiring dengan semakin padatnya penduduk dan kebutuhan di Indonesia (Lestari, 2018: 84). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mencatat 12,40% Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga berlaku (ADHB) bersumber dari sektor pertanian. Kontribusi ini ditopang oleh sejumlah subsektor. Tanaman perkebunan menyumbang persentase paling besar terhadap PDB, yaitu sebesar 3,76%.

Besarnya segmentasi pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menyebabkan lahirnya kebijakan untuk mendorong upaya penguatan sektor

pertanian yang berkelanjutan. Hal ini direfleksikan oleh pemerintah, melalui program bantuan, pendampingan dan pemberdayaan bagi para petani. Program pemberdayaan kelompok tani diarahkan pada pemberian pelatihan dan penyuluhan, pemberian bantuan bibit dan pupuk, serta pemberian bantuan teknologi kepada petani (Hasibuan, 2022:1).

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pembangunan pertanian identik dengan modernisasi pertanian sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Modernisasi dalam sektor pertanian sering kali diimplementasikan melalui bantuan teknologi dan alat-alat modern. Hal ini juga berlaku untuk peningkatan olahan produksi pertanian. Modernisasi alat dan mesin produksi olahan pertanian dinilai penting untuk mempercepat proses pendistribusian komoditi unggulan milik masyarakat.

Teknologi pertanian diartikan sebagai penerapan ilmu teknik dalam kegiatan pertanian. Penggunaan alat dan mesin pertanian selalu berkembang sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Transformasi sektor pertanian menyebabkan perubahan yang signifikan pula terhadap teknologi produksi maupun olahan hasil pertanian. Alat dan mesin yang awalnya sederhana berkembang menjadi lebih modern (Nurdin, 2021:274). Alat dan mesin pertanian digunakan untuk menutupi kelemahan dari tenaga manusia dalam memproduksi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan efisiensi usaha tani melalui penghematan tenaga, biaya produksi, serta efisiensi waktu.

Maka dari itu, pemerintah menerapkan bantuan berupa teknologi pertanian baik untuk produksi maupun olahan hasil pertanian demi menyokong dan

meningkatkan hasil produksi pertanian baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang berujung pada penguatan ekonomi secara berkelanjutan. Melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang memiliki peran strategis dalam mendukung modernisasi pertanian, di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berkewajiban mendukung penelitian adaptif dan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, menyebarluaskan hasil penelitian dan teknologi kepada petani dan masyarakat, serta menyediakan rekomendasi teknologi untuk mendukung pembangunan pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sasaran dari pemberdayaan petani meliputi peningkatan akses terhadap teknologi, informasi, pasar, modal, dan infrastruktur pertanian. Pemerintah harus menyediakan fasilitas pelatihan, penyuluhan, dan inovasi teknologi yang spesifik lokasi masing-masing petani/kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. Kelompok tani dalam pengadaan program dan sistematika pertanian bertugas untuk mengambil keputusan, menyusun usaha tani, menerapkan teknologi tepat guna, membentuk pola kerja sama dengan mitra, menganalisis usaha tani, dan meningkatkan kelestarian sumber daya alam (Nugroho, 2017:199).

Inovasi teknologi pertanian merupakan suatu stimulan bagi kelompok tani untuk menggelar usaha pertanian yang jauh lebih efisien dengan menghemat waktu, tenaga, dan faktor produksi lainnya. Penyediaan teknologi dan pemberdayaan petani diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan harapan dapat

meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta membangun pertumbuhan perekonomian petani secara berkelanjutan. Wilayah dengan potensi unggulan menjadi bidik utama sasaran kebijakan.

Namun melihat sejarah pembangunan, berbagai kebijakan pembangunan sering kali dirancang dengan asumsi bahwa masyarakat yang menjadi sasaran akan merespons dengan cara yang seragam, sesuai dengan perencanaan teknokratik. Padahal realitanya implementasi kebijakan kerap kali menunjukkan hasil yang bervariasi dan capaian yang berbeda berdasarkan pada siapa program itu diberikan, dan bagaimana perencanaan yang dilakukan.

Perbedaan dalam proses implementasi ini disebabkan oleh kondisi sosiokultural atau kondisi sosial budaya yang berbeda pula di setiap masyarakat (Marzali, 2009:76). Keadaan sosial budaya ini sangat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan, karena dalam faktor ini terdapat kultur yang menjadi pedoman terhadap perilaku dan struktur sosial yang berupa pola hubungan sosial masyarakat. Perbedaan dalam faktor sosial budaya ini akan menyebabkan perbedaan pula dalam bagaimana masyarakat merespon dan berperilaku akan program pembangunan yang sedang dijalankan.

Salah satu daerah yang memiliki komoditas unggulan dan menjadi sasaran penerapan inovasi teknologi produksi pertanian adalah Nagari Siguntur. Nagari ini terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Siguntur memiliki komoditas unggulan berupa gambir yang menjadi pilar utama perekonomian sebagian besar penduduk. Nagari Siguntur menjadi salah satu daerah penghasil gambir terbesar di Sumatera Barat. Berdasarkan data Dinas

Perkebunan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009 hasil produksi tanaman gambir di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 3.317,77 ton dengan hampir 85 % hasil gambir berasal dari Nagari Siguntur.

Gambir merupakan getah yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) yang melewati proses pengeringan. Proses pengolahan gambir di Nagari Siguntur selama ini dilakukan secara tradisional dengan alat sederhana. Besarnya potensi gambir di Nagari Siguntur membuka peluang peningkatan ekonomi petani berbasis modernisasi pertanian. Maka pada tahun 2016 Nagari Siguntur mendapat bantuan alat Kempa modern dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia yang membidangi isu terkait pertanian, kehutanan dan kelautan. Bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BTPT) Sumatera Barat, Komisi IV DPR mengadakan teknologi pemrosesan pasca panen di Nagari Siguntur melalui satu unit rumah produksi yang dilengkapi dengan mesin hidrolis yang dapat menghasilkan getah gambir kualitas tinggi. Peralihan pengolahan gambir tradisional menuju pengolahan gambir modern menggunakan mesin hidrolis dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi produksi, karena gambir dengan kualitas tinggi memiliki harga yang lebih mahal di pasaran. Bantuan ini diselenggarakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui oleh DPR mencapai Rp 350.000.000. Bersamaan dengan itu, petani gambir juga mendapat pelatihan dan penyuluhan untuk mengoperasikan alat Kempa modern. Bantuan ini diimplementasikan kepada gabungan kelompok tani yang terbentuk secara formal, yaitu Gapoktan Siguntur Sepakat.

Namun, program ini belum mendapatkan dukungan penuh dari para petani gambir yang tergabung dalam Gapoktan Siguntur Sepakat akibat bertahannya petani pada sistem pengolahan gambir secara tradisional. Bantuan alat kempa modern bagi petani gambir di Nagari Siguntur hanya beroperasi selama kurang lebih tiga bulan. Nagari Siguntur merupakan daerah yang memiliki tradisi panjang dalam pengolahan gambir. Bagi masyarakat setempat, pengolahan gambir yang dalam istilah lokal disebut *mengampo* tidak hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian integral dari budaya dan kehidupan sosial mereka. Pemberian alat modern, seperti mesin hidrolik untuk pengolahan gambir, menggeser pola kerja kolektif menuju individualisme. Hal ini merusak tatanan sosial yang selama ini menjadi landasan kehidupan petani.

Selain itu, petani merasa mengalami banyak kendala dalam mengoperasikan alat kempa modern. Terjadi banyak benturan antara pengetahuan petani mengenai pengolahan gambir secara tradisional dengan sistem produksi gambir dengan alat kempa modern. Pelaksanaan bantuan alat kempa modern yang tidak sesuai dengan fondasi sosial budaya masyarakat, menempatkan petani dalam posisi yang sulit untuk beradaptasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pembangunan pertanian, masalah terbesarnya bukan pada masalah teknis, melainkan pada aspek sosial budaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa bantuan alat Kempa yang diperuntukkan bagi petani gambir di Nagari Siguntur gagal untuk mencapai tujuan yang diinginkan akibat bertahannya petani pada sistem pengolahan gambir

tradisional. Menarik untuk melihat bagaimana kendala yang diterima petani dalam mengadopsi sistem pengolahan modern. Dimana sistem pengolahan tradisional telah menciptakan rasa kepemilikan dan kepercayaan yang sulit digantikan oleh teknologi baru. Hal ini berkaitan dengan berbagai unsur kebudayaan, sebab segala tindakan yang diwujudkan petani mengacu pada sebuah tatanan kebudayaan milik masyarakat yang bersangkutan

Maka dari itu, sebelum adanya penerapan pembangunan suatu masyarakat penting untuk melihat dan menganalisis model budaya yang bersangkutan. Agar pembangunan yang hadir berbasis dari kebutuhan dan daya masyarakat tersebut, bukan hanya bertolak pada pemenuhan dan visi menciptakan peningkatan pada skala ekonomi saja. Menurut Koentjaraningrat (1990:112) bahwa hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Dalam pembangunan, masyarakat menjadi pelaku dan sekaligus objek dari aktivitas pembangunan. Keterkaitan atau korelasi antara masyarakat dan pembangunan akan terjadi melalui pengendalian dari kebudayaan. Di dalam kebudayaan, tatanan nilai menjadi inti dan basis bagi tindakan manusia. Fungsi elemen nilai (*cultural value*) bagi pembangunan adalah untuk mengevaluasi proses pembangunan agar tetap sesuai dengan standar dan kadar manusia.

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses menata dan mengembangkan pranata- pranata dalam masyarakat, yang di dalam pranata tersebut berisi nilai-nilai dan norma-norma untuk mengatur dan memberi pedoman bagi eksistensi tindakan masyarakat. Sejumlah pranata tersebut, antara lain pendidikan, agama, ekonomi, politik, ekologi, akan membentuk suatu keterkaitan fungsional guna

mendukung, melegitimasi dan mengevaluasi kompleks tindakan manusia tersebut. Dengan kata lain, pembangunan akan menyinggung isu pemeliharaan nilai dan norma masyarakat, namun sekaligus membuka ruang bagi isu perubahan sosial.

Kegagalan dalam menerapkan sebuah kebijakan pembangunan baru di bidang pertanian, misalnya bantuan alat kempa tidak meliputi satu atau sebagian unsur saja, tetapi meliputi spektrum kemanusiaan yang luas, karena berbagai kebudayaan ikut campur dalam hubungannya dengan pengolahan gambir di Nagari Siguntur. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan alat kempa modern untuk kelompok tani gambir di Nagari Siguntur?
2. Bagaimana kendala sosial budaya dalam pelaksanaan bantuan alat kempa bagi Gapoktan Siguntur Sepakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan bantuan alat kempa modern di Nagari Siguntur
2. Untuk menganalisis kendala sosial budaya dalam pelaksanaan bantuan alat kempa modern bagi Gapoktan Siguntur Sepakat

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu Antropologi Sosial untuk memahami kendala sosial budaya kelompok tani di

Nagari Siguntur secara komprehensif terutama tentang bagaimana petani merespon, memahami, dan menjalankan bantuan alat Kempa yang telah diberikan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga dilakukan untuk menyumbangkan pemahaman lebih lanjut tentang fondasi sosial budaya pada masyarakat yang mempengaruhi capaian bantuan alat Kempa bagi kelompok tani. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dan strategi pembangunan yang lebih efektif di masa mendatang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Studi mengenai faktor sosial budaya di masyarakat bukanlah hal baru dalam khasanah ilmu antropologi. Kendala sosial budaya pada masyarakat acapkali disandingkan dengan indeks keberhasilan program yang hadir di tengah masyarakat. Namun, masih sukar menemukan penelitian yang mengkaji pelaksanaan program bantuan pada petani perkebunan komoditi non-unggulan seperti gambir. Umumnya pembahasan penelitian seperti ini melibatkan pertanian lahan basah, seperti sawah yang identik dengan sistem pertanian pedesaan. Pada lain kesempatan, kajian tentang program pembangunan pertanian juga lebih terbatas pada hal-hal berbaur teknis sesuai dengan mekanisme program bukan pada daya dan permintaan yang diinginkan masyarakat.

Kendatipun demikian, penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu sebagai landasan dalam mengkaji topik permasalahan. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan, yaitu penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian baik dalam arena pembahasan program pembangunan pertanian yang

mengikutsertakan aspek sosial dan aspek budaya dalam dinamika kelompok tani. Berikut literatur yang dijadikan tinjauan dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

Penelitian pertama berjudul *“Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Masyarakat Subsisten: Analisis Kebijakan Revolusi Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT”* karya Waskitojati et. al (2019). Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini secara komprehensif mengkaji Kebijakan Revolusi Pertanian yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2014-2019 untuk meningkatkan perekonomian petani dan sekaligus mengatasi problem kemiskinan. Analisis kebijakan dilakukan melihat aspek-aspek politik, ekonomi, teknologi, sosial-budaya (Analisis PETS) serta juga inovasi dari kebijakan revolusi pertanian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan revolusi pertanian belum bisa memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan dikarenakan tantangan karakteristik masyarakat yang subsisten dan kelembagaan kebijakan yang melemah.

Penelitian kedua, yaitu tesis yang ditulis oleh Hasibuan (2022) dengan judul *“Efektivitas Penyaluran Alat Mesin Pertanian Pada Kelompok Tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”*. Penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan mekanisme program (Alsintan) di Kecamatan Portibi. Program Alsintan yang hadir bagi kelompok tani terefektivitas hanya sesuai dengan rancangan teknis, akan tetapi mengesampingkan latar belakang sosial budaya miliki petani yang merupakan bagian integral dari masyarakat. Maka dari

itu tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana skema pemberian alat dan mesin pertanian pada kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, sekaligus menganalisis aspek-aspek yang menjadi hambatan dalam efektivitas program alat dan mesin pertanian pada lokasi penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini memaparkan bahwasanya penyaluran alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sudah berjalan cukup efektif, karena didasarkan pada adanya partisipasi petani, transparansi program, perhitungan akuntabel, dan praktik yang sistematis. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penyaluran program Alsintan yang meliputi minimnya pengetahuan anggota kelompok tani terkait dengan jenis alat mesin pertanian. Selanjutnya hambatan geografis yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan sehingga sulit diakses petani. Hambatan yang terakhir datang dari Dinas Pertanian yang belum mumpuni untuk merealisasikan kebutuhan dan harapan petani akibat dana yang tidak mencukupi.

Penelitian ketiga, yang ditulis oleh Putri et. al (2022) dengan judul “*Kedinamisan Kelompok Tani dan Faktor Yang Mempengaruhinya*”. Penelitian ini berlatar tempat di Papua Barat dengan landasan Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan kelompok tani. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dinamika kelompok tani Sayro di Kampung Sayro, Distrik Manokwari Utara, Provinsi Papua Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menjelaskan bahwa tercapainya keberhasilan program-program pembangunan pertanian semestinya dilihat dari dinamika kelompok tani yang bergerak menuju proses yang kompleks. Maka dari itu,

keadaan sosial budaya pada masyarakat harus menjadi landasan utama untuk menciptakan kelompok tani yang dapat meningkatkan efisiensi hasil pertanian.

Keempat, penelitian yang berjudul “*Pemberdayaan Dalam Menerapkan Program System of Rice Ineraction berbasis Kegiatan Kelompok*” ditulis oleh Khoiri (2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan petani dalam efektivitas program *System of Rice Ineraction* (SRI) dan mengidentifikasi strategi kelompok pemberdayaan petani dalam implemtasi program *System of Rice Ineraction* pada kelompok tani barokah, Desa Rowo Tengah, kecamatan Sumerbaru, Kabupaten Jember.

Adapun hasil dari penelitian ini kemampuan petani memberdayakan dirinya dalam program SRI dapat dilihat berdasarkan: pilihan petani serta peluang sebagai penerima program, kempuan petani dalam mengakses kebutuhan usaha taninya, kemampuan menyampaikan keluhan, kemampuan menjangkau teknologi, peningkatan sumberdaya petani serta pengelolaan program.

Penelitian kelima, yaitu penelitian dari jurnal ilmiah kajian antropologi Universitas Diponegoro, dengan judul “*From Agricultural to Landless: Studi Dampak Pembangunan Bantul Kota Mandiri*” yang ditulis oleh Purwasari (2023). Penelitian ini disinyalir oleh program pembangunan Bantul Kota Mandiri (BKM). Program ini membutuhkan setidaknya 100 hektar lahan masyarakat untuk membangun perumahan elit, kawasan rekreasi, perdagangan dan lain-lain. Muaranya, terjadi penyempitan dan krisis lahan pertanian di Bantul yang turut serta menyeret masyarakat untuk melakukan peralihan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendirian BKM tidak hanya berdampak pada penyempitan lahan,

tetapi juga pada peningkatan arus penduduk dan peralihan mata pencaharian. Program ini juga akan menimbulkan guncangan sosial-budaya masyarakat setempat, seperti orientasi generasi muda yang konsumtif dan tidak produktif.

Berdasarkan berbagai literatur di atas, terlihat bagaimana bantuan alat Kempa bagi masyarakat yang disalurkan terhadap kelompok tani terealisasi dengan berbagai hasil dan capaian, dengan berbagai faktor dan penghambat yang terjadi. Beberapa penelitian membahas pelaksanaan program pembangunan pertanian secara teknis dan beberapa penelitian ingin melihat bagaimana program pertanian lain diaplikasikan dan memberi dampak kepada kelompok tani sekaligus menyandingkan hal tersebut dengan kondisi sosial masyarakat petani.

Hal ini memberi indikasi bahwa pada masyarakat yang berbeda, maka berbeda pula capaian dari bantuan alat kempa yang diterapkan bagi kelompok tani. Maka dari itu, peneliti ingin turut melakukan kajian untuk melihat efektivitas program pada kelompok tani. Namun berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini akan mengkaji program dengan fokus pada aspek social budaya masyarakat yang diidentifikasi melalui kelompok tani. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada capaian bukan hanya terbatas pada praktik dan dampak. Selain itu lokasi yang dipilih juga berbeda, dimana lokasi pada penelitian ini berada di Nagari Siguntur, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Bantuan alat kempa merupakan kebijakan pembangunan digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui modernisasi pengolahan gambir agar produksi yang dihasilkan lebih efisien dan menciptakan peningkatan

ekonomi berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya bantuan ini gagal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Benturan pada dimensi sosial budaya menjadi kendala yang mempengaruhi ketidakberlanjutan kebijakan ini. Untuk itu, dalam menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep, sebagai berikut:

### 1. Kebijakan Pembanguna Pertanian

Melalui rancangan PBB terkait Dasawarsa Pembangunan pada tahun 1961, Pemerintah negara-negara anggota PBB yang masuk ke dalam *underdevelopment countries* termasuk Indonesia menyambut program pembangunan dengan sangat antusias. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan yaitu: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas-bawah (*top-down*), (5) bawah-atas (*bottom-up*).

Namun dewasa ini, kebanyakan pembangunan didasari oleh kerangka modernisasi yang berkiblat hanya pada hal material. Program pembangunan kebanyakan ditentukan dari atas (*top-down blue print*), dan dirancang dari atas (*top-down process*) Pembangunan tersebut banyak berakhir dengan kegagalan seperti Revolusi Hijau di Filipina, India, dan Indonesia yang hanya menguntungkan elit tertentu (Tresno, 2022:4). Sementara itu, di beberapa negara pembangunan yang dirancang dari atas hanya diterima secara apriori, bahkan ada yang ditolak oleh masyarakat karena tidak cocok dengan kebutuhan mereka.

Model pembangunan ini disinyalir dari penggunaan teori modernisasi pembangunan. Di mana pembangunan ini mengemukakan bahwa masyarakat

mengikuti perkembangan linear dari tradisional ke modern, dengan masyarakat Barat menjadi model pembangunan. Teori pembangunan ini hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial politik sebagai komponen penting pembangunan, dan mengabaikan unsur kebudayaan (Rostow, 1960). Menurut pandangan ini pembangunan menjadi mungkin jika aspek-aspek tertentu dari budaya dapat diubah dimana seluruh masyarakat akan mengikutinya.

Dasar kedudukan penelitian ini merujuk pada teori pasca pembangunan yang muncul pada tahun 1990an sebagai kritik terhadap wacana pembangunan yang dominan dan asumsi –asumsi yang mendasarinya. Menurut paradigma ini, budaya bukan hanya sebagai situs dan kontestasi, serta setiap pembangunan pasti gagal karena dimainkan di ruang pertempuran politik. Ranah teori ini, konsep pembangunan dianggap bias secara budaya dan berpusat pada praktik modernitas yang memaksakan serangkaian nilai dan praktik tertentu pada masyarakat non-Barat. Para ahli teori ini menyerukan pendekatan alternatif yang lebih sensitif secara budaya, dengan mengakui keragaman pengalaman dan aspirasi manusia (Esobar, 1995:51). Maka dari itu, konsep pembangunan tidak dapat terlepas dari keterlibatan budaya untuk memandang mekanisme yang tepat dan sesuai bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan program.

Sejalan dengan pandangan Tania Murray Li dalam bukunya *The Will To Improve* pembangunan dimaknai sebagai “kehendak untuk memperbaiki” di mana aktor-aktor pembangunan, baik itu pemerintah, dan lembaga lainnya bertanggung jawab untuk mengintervensi kehidupan masyarakat demi memperbaikinya. Pandangan ini dipengaruhi teori *governmentality* Michel Foucault, dalam hal ini

Li melihat seringkali perencanaan pembangunan diwarnai oleh relasi kuasa, ideologi, dan praktik politik yang kompleks. (Li, 2007:24)

Pembangunan pertanian adalah elemen kunci dalam strategi pembangunan nasional di Indonesia. Sektor ini tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar populasi, terutama di daerah pedesaan, tetapi juga merupakan sumber utama pangan, pendapatan dan stabilitas nasional. Konteks pembangunan pertanian, paradigma pasca pembangunan menuntut adanya penghargaan terhadap pengetahuan lokal, praktik tradisional dan otonomi komunitas dalam menentukan jalur pembangunan. Di Indonesia pertanian memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian, sehingga penting untuk mengkaji pendekatan yang digunakan dalam pembangunan (Moore, 1966:81)

Konsep antropologis memandang pertanian sebagai salah satu representasi dari pranata budaya ekonomi lokal. Artinya, mekanisme perilaku, moral, dan pranata budaya adalah realitas yang terjadi. Maka secara teoritis, kita dapat mengetahui bagaimana budaya diimplementasikan dan direspon dalam dinamika ekonomi, dan aktivitas sosial. Rhoades mendefinisikan pertanian sebagai pandangan manusia terhadap tindakan bertani, yang berkonsentrasi pada sistem pengetahuan lokal. Lensa Antropologi melihat pertanian bukan hanya sekedar proses teknis atau kombinasi tekno-ekonomi, namun sebagai ciptaan manusia yang kompleks dan proses evolusi yang mencakup komponen sosial-budaya dan ideologi yang sama pentingnya dalam interaksi satu sama lain dengan lingkungan alam (Rhoades, 1984:64).

Sejatinya kebijakan pembangunan pertanian yang banyak dilakukan di wilayah pedesaan merupakan interaksi yang dilakukan antara pemberi dan penerima program untuk mewujudkan tujuan dalam peningkatan produktivitas, dan kestabilan ekonomi. Penyelarasan pandangan yang terkoneksi antara pemberi dan penerima harus menjadi junjungan utama agar benturan tidak terjadi. Namun, dalam beberapa realitas yang terjadi justru kebalikannya. Bantuan alat Kempa diselenggarakan berdasarkan pandangan modernisasi dengan pendekatan *top-down*. Seperti yang telah penulis bahas sebelumnya program ini bertujuan dalam peningkatan ekonomi, dan kebijakan sepihak serta beranggapan hal ini akan diterima oleh petani lokal secara seragam.

## 2. Pendekatan Kultural dalam Pembangunan

Pendekatan kultural merupakan ciri tersendiri untuk mengkaji fenomena yang ada. Penting untuk memahami bahwa petani membentuk kebudayaannya sendiri dalam melaksanakan mekanisme pertaniannya. Wolf membedakan antara petani pedesaan atau petani tradisional (*peasant*) dan pengusaha pertanian atau petani modern (*farmer*). Secara garis besar golongan pertama adalah kaum petani yang masih tergantung pada alam dan menggunakan pengetahuan dan teknologi tradisional dalam pengembangan produksinya. Produksi mereka lebih ditujukan untuk sebuah usaha menghidupi keluarga, bukan untuk mengejar keuntungan. Sebaliknya, *farmer* adalah golongan petani yang usahanya ditujukan untuk mengejar keuntungan. Mereka menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan usaha modern dan menanam jenis tanaman yang laku di pasar (Wolf, 1985:2).

Sebagaimana menurut UNESCO (dalam Bergendrof, 2007) mengatakan budaya menjadi unsur penting dalam kebijakan pembangunan. Budaya sebagai mekanisme integratif di mana orang bertindak. Para antropolog memandang pembangunan sebagai suatu proses kebudayaan, dimana masyarakat mengalami perubahan ketika mereka terlibat dan beradaptasi dengan ide-ide, teknologi, dan praktik-praktik baru. Perspektif ini menekankan pentingnya memahami budaya dan konteks lokal ketika merancang dan melaksanakan intervensi pembangunan (Gardner & Lewis, 2015:211). Idealnya pembangunan terbentuk berdasarkan hasil penyelarasan dari pendekatan *top-down* yang berasal dari pandangan dan pertimbangan para ahli dan badan-badan pengembang masyarakat dari luar, dan pendekatan *bottom-up* yang berasal dari pandangan *the native's point of view* masyarakat lokal (Marzali, 2009:33).

Kembali mengambil pandangan Li yang menilai pembangunan yang terjadi hanya berfokus pada masalah teknik dan ekonomis tanpa memperhatikan sosial budaya masyarakat sering kali berujung pada kegagalan (Li, 2007:221). Pembangunan pertanian yang dilakukan dari perspektif teknokratis dimana persoalan-persoalan yang dianggap "tidak efisien" atau "terbelakang" dalam masyarakat diperlakukan sebagai masalah teknis yang memerlukan solusi teknis pula. Namun, dengan cara ini, program pembangunan sering mengabaikan kompleksitas sosial dan budaya yang ada. Misalnya, peran struktur sosial, ikatan kekerabatan, atau adat-istiadat yang membentuk tatanan kehidupan masyarakat sering dianggap sebagai hambatan daripada dilihat sebagai potensi yang bisa dikembangkan.

Pandangan tentang kekhususan kultural banyak dikemukakan oleh para antropolog pedesaan seperti Kroeber, Field, dan Foster. Ketiganya menekankan pada perkembangan nilai-nilai, persepsi, dan kebudayaan petani terhadap lingkungan luarnya. Mereka menganggap petani hidup dalam satu komunitas yang tertutup dan terisolasi dari dunia luar, di mana hubungan pertanian keluarga memainkan peranan yang sangat besar, hubungan- hubungan ekonomi yang dibangunnya dilandasi oleh nilai-nilai lokal yang berlaku.

### 3. Aspek Sosial Budaya

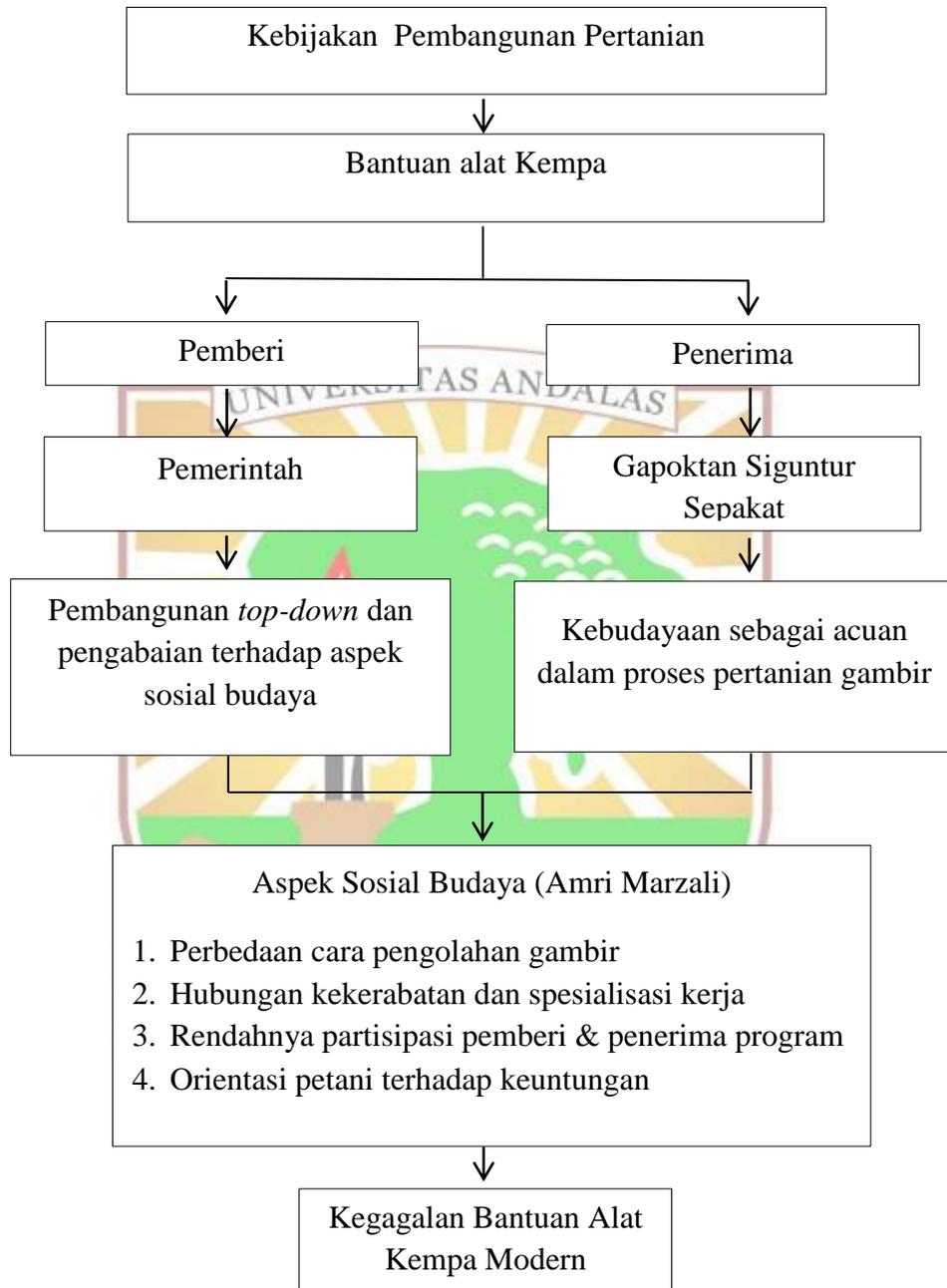
Maka, proses inklusi terhadap bantuan alat Kempa yang dihadirkan tanpa melihat keadaan sosial budaya sasaran program akan melewati sejumlah kendala dalam implementasinya. Aspek sosial mengacu pada interaksi dan hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Faktor sosial juga meliputi struktur sosial, pola hubungan antar masyarakat, antar kelas antar golongan, dan antar sektor lainnya (Marzali, 2009:76). Petani tradisional memprioritaskan kerja kolektif dan ikatan kekeluargaan daripada individualism, yang dapat bertentangan dengan tekanan ekonomi modern (Wolf, 1985:110)

Sedangkan aspek budaya yang mengacu tatanan gagasan, pada kebiasaan, tradisi, bahasa dan pola perilaku dari suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini, kultur yang dimaksud lebih mengacu pada pandangan aliran *ideational* yang menitikberatkan pembentukan perilaku yang khas dari suatu masyarakat bersumber dari sebuah hal yang abstrak, berupa gagasan dan pemikiran. lebih lanjut kultur dalam hal ini dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti etos, nilai, mentalitas, spirit dan lainnya.

Kedua aspek ini menjadi kompleks bergerak bersisian dalam menentukan individu. Geertz menjelaskan lebih lanjut bahwa kultur diibaratkan sebagai jaringan makna, yang digunakan untuk menafsirkan segala pengalaman serta menjadi penuntun tindakan, dan wujud dari tindakan yang dilakukan yang membentuk jaringan hubungan sosial disebut sebagai struktur sosial (Geertz, 1987 dalam Marzali, 2009:79-80). Pengabaian terhadap hal ini akan menyebabkan program tersebut menjadi tidak berkelanjutan. Bahkan ketika petani, menerima program pembangunan pertanian tersebut, mereka mungkin tidak sepenuhnya mengintegrasikan ke dalam sistem sosial mereka, yang menyebabkan program tersebut ditinggalkan.

Hal ini juga diperburuk oleh wacana bantuan alat kempa yang bersifat *top-down* yang minim melibatkan partisipasi lokal sehingga gagal menangkap kompleksitas sosial dan budaya yang ada. Nagari Siguntur merupakan contoh konkret untuk melihat bahwa praktik-praktik pertanian, khususnya pertanian gambir selalu akrab dengan kebudayaan petani. Kebudayaan ini telah berakar sejak lama, dan diwariskan secara turun-temurun. Pengelolaan atas gambir menjadi bagian integral dari identitas budaya dan sosial. Muaranya, petani-petani lokal memiliki kecenderungan untuk mempertahankan praktik-praktik tradisional walaupun terdapat peluang untuk berubah.

**Bagan 1.**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Data Primer, Tahun 2024*

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nagari Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nagari ini merupakan wilayah pemekaran Nagari Siguntur yang saat ini terbagi menjadi Nagari Siguntur Tua dan Nagari Siguntur. Pada tahun 1990 dua nagari ini tergabung dalam satu kenagarian, hingga pada tahun 2002, Nagari Siguntur terpisah dari Nagari Siguntur Tua. Berdasarkan data profil nagari, sebagian besar masyarakat di Nagari Siguntur pada umumnya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Tanaman gambir dan sawah menjadi komoditi yang mendominasi di lahan seluas 1.164 ha. Bahkan Nagari Siguntur merupakan salah satu pemasok gambir terbesar di Sumatera Barat,

Maka dari itu, program-program pembangunan pertanian turut menjadikan nagari Siguntur sebagai sasarannya. Program pertanian seperti pemberdayaan petani, berupa pemberian bantuan dan pendampingan telah ada sejak tahun 1992. Program ini diregulasikan melalui perangkat Nagari untuk kemudian diterima oleh kelompok tani. Terdapat tujuh kelompok tani di Nagari Siguntur, yaitu kelompok tani Sungai Sariak, Tanah Melayu, Sawah Manggadang, Jalan Ka Lauik, Sawah Patai, Sawah Tanjung Gadang, dan kelompok tani Sawah Sumua dan Gabungan Kelompok Tani Siguntur Sepakat yang merupakan organisasi yang dibentuk untuk para petani gambir di Nagari Siguntur.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Prinsip penelitian kualitatif bersifat *naturalistic* atau alamiah. Disebut *naturalistic* karena situasi lapangan bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data kualitatif yang umumnya direfleksikan melalui kalimat atau pernyataan-pernyataan dan bukan berdasarkan data yang berbentuk angka atau bilangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan (Moleong, 2012:5)

Menurut Sugiyono (2016:9) penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab lebih detail hal yang akan diteliti dengan cara menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab suatu kejadian, individu maupun kelompok. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini dipilih karena efisien untuk mendeskripsikan dan menjelaskan nilai yang berkembang di masyarakat untuk memahami suatu pola tertentu.

Metode kualitatif mempunyai pendekatan yang lebih variatif daripada pendekatan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu model eksplorasi atau pengidentifikasian suatu kejadian secara khusus dengan penggalian data secara mendalam (Cresswell, 2014). Ciri utama dari penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu memperlihatkan pemahaman mendalam tentang suatu kasus. Substansi penelitian ini adalah membangun kajian mengenai bagaimana kegagalan program pembangunan

pertanian bukan hanya disebabkan oleh masalah teknis, melainkan ada campur tangan budaya di dalamnya.

### 3. Informan Penelitian

Data penelitian bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap informan. Secara singkat, informan penelitian berarti orang-orang yang terlibat maupun turut andil dalam praktik program yang sedang dijalankan. Informan peneliti merupakan orang atau para partisipan yang dapat memberikan data terbaik tentang permasalahan riset (Creswell, 2014:207).

Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan relevansi topik penelitian. Kriteria tersebut terdiri dari (1) individu yang terlibat langsung dalam aktivitas pertanian gambir di Nagari Siguntur; (2) memiliki pengetahuan sebagai pelaku dalam penyaluran bantuan alat Kempa modern di Nagari Siguntur; (3) merupakan individu yang terkait baik secara kelembagaan atau perseorangan terkait efektivitas bantuan alat Kempa; (4) individu lain yang memiliki pengetahuan terhadap aspek sosial budaya di Nagari Siguntur.

Dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1986:164 ) terdapat dua jenis informan dalam penelitian kualitatif diantaranya sebagai berikut:

1. Informan Kunci (*Key Informant*) adalah mereka yang terlibat langsung dan mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi dan implementasi bantuan alat kempa, seperti wali nagari, serta pengurus Gapoktan Siguntur

Sepakat. Pihak-pihak yang menjadi sasaran program dan yang memiliki pengalaman terhadap realisasi bantuan alat Kempa, yaitu petani gambir, serta tauke yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana kualitas produk, dinamika harga, dan tanggapannya terhadap pengolahan gambir modern di rumah kampa.

**Tabel 1.**  
**Informan Kunci**

NO	Nama	Umur (Tahun)	Posisi	Informasi
1.	Sasriadi	52	Wali Nagari	Informasi terkait data kenagarian dan perencanaan bantuan alat Kempa
2.	Anton Ardian	56	Tokoh Masyarakat dan Anggota Gapoktan Siguntur Sepakat	Informasi terkait sistem sosial budaya petani gambir dan implementasi bantuan alat Kempa
3.	Junaidi Fendri	46	Bendahara Gapoktan Siguntur Sepakat	Informasi terkait realisasi program dan kendalanya
4.	Emradis	47	Tauke	Informasi mengenai distribusi dan harga jual gambir
5.	Marzuki	40	Petani Gambir	Informasi mengenai hasil produksi menggunakan alat kempa modern.

Sumber: Data Primer, 2024

- Informan biasa, merupakan mereka yang dapat memberikan informasi penting sebagai penguat data yang telah diperoleh sebelumnya. Meskipun dalam praktiknya, informan biasa kadang tidak terlibat langsung dalam implementasi bantuan alat kempa modern bagi kelompok tani, tapi memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap capaian program.

**Tabel 2.**  
**Informan Biasa**

NO	Nama	Umur (Tahun)	Posisi	Informasi
1.	Neswan	51	Anggota Gapoktan Siguntur Sepakat	Informasi mengenai bantuan alat Kempa
2.	Artion	51	Anggota Gapoktan Siguntur Sepakat	Informasi mengenai pengolahan gambir secara tradisional
3.	Esi	42	Bundo Kandang Bamus	Informasi mengenai kehidupan sosial nagari
4.	Afrizal	57	Petani Gambir	Informasi pembibitan gambir

Sumber: Data Primer, 2024

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berikut merupakan penjelasan terkait teknik pengumpulan data tersebut

##### a. Observasi Partisipasi

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud untuk meraih data empiris pada hasil temuan. Pengamatan berarti memperhatikan dengan menggunakan indera untuk mengamati isu atau persoalan yang terjadi dilapangan dengan bantuan alat atau perangkat perekam untuk kebutuhan data ilmiah (Creswell, 2015:231). Pengamatan berfungsi untuk membuktikan apakah benar lingkungan dan masyarakat bertindak sesuai dengan yang mereka ucapkan (Ihromi, 1986:51).

Pengamatan ini dilakukan dengan ikut berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan masyarakat umum, khususnya pada proses pengolahan gambir secara tradisional. Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan data empiris

terkait cara petani mengolah gambir bersama kelompok kecil dengan tradisional. Hal ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi rumah kampo di masing-masing lahan gambir milik petani.

Pengamatan mendalam juga dilakukan di lokasi bantuan alat Kempa untuk mengamati kondisi alat dan mesin program serta untuk mendapatkan data terkait hasil ataupun output dari bantuan alat Kempa. Kondisi geografis, interaksi antar masyarakat, sarana dan prasarana, dan pola pemukiman juga menjadi hal yang tidak lupu diamati sebagai pelengkap data penelitian.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi verbal antara informan dan peneliti. Wawancara dilakukan untuk menggali data yang tidak dapat dijangkau melalui proses observasi, karena data yang hadir pada proses wawancara berupa gagasan, pengalaman, serta pandangan dari perspektif masing-masing informan.

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan instrumen penelitian yang terstruktur atau tersusun secara sistematis. Dalam proses wawancara ini, pedoman wawancara hanya berdasarkan garis besar permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk memberi kebebasan dan membangun hubungan komunikasi yang lebih fleksibel antara informan dan peneliti untuk memberikan pendapat, pikiran, dan pandangannya (Sugiyono, 2016:220)

Data yang ingin diperoleh penulis dalam proses wawancara ialah data historis terkait pengalaman-pengalaman petani saat terlibat dalam bantuan alat kempa, apa yang dirasakan, apa yang pernah dilalui, dan apa yang pernah terjadi saat program tersebut berhadapan dengan ritme kerja petani yang telah lama menggunakan cara tradisional. Wawancara juga secara khusus untuk mendapatkan data holistik terkait komoditi gambir di Nagari Siguntur dan kaitannya terhadap sosial budaya masyarakat.

### c. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu umumnya berbentuk arsip seperti tulisan, gambar, data-data, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 2016:329). Teknik ini digunakan untuk mencari data-data dari informan terkait terkait efektivitas program bantuan alat dan mesin pertanian di Nagari Siguntur. Studi dokumen akan memberi penguatan untuk data yang sudah diperoleh melalui proses observasi maupun wawancara.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data dimulai dengan melakukan klasifikasi data (data dalam bentuk transkrip, dokumen foto atau berkas) untuk dianalisis. Selanjutnya melakukan reduksi data untuk menjadi sebuah topik melalui proses penafsiran dan ringkasan untuk disajikan dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan (Creswell, 2014:251)

Dalam hal ini, lebih lanjut Creswell (2014:64) menjelaskan pada penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, setelah menghimpun data, proses pendeskripsian data terkait kasus yang diteliti harus beriringan dengan konteks. Maka dari itu, penting untuk membentuk kategorikal dan mengembangkan generalisasi naturalistik, sehingga dapat menyajikan gambaran mendalam tentang kasus.

Selanjutnya pada proses verifikasi data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengujian terhadap keabsahan data yang diperoleh kepada beberapa sumber, metode, dan waktu (Trianto, 2011:294). Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumen tertulis, serta catatan-catatan yang didapatkan selama di lapangan. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa kepada sumber (informan) dengan teknik yang berbeda, namun untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi waktu merupakan jenis triangulasi yang sangat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang didapatkan pada siang hari, bisa jadi berbeda ketika diperiksa pada malam hari. Maka dari itu relevansi waktu akan memberikan data yang valid dan lebih kredibel.

## **6. Proses Jalannya Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat petani gambir di Nagari Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian dimulai semenjak awal bulan Oktober 2023 dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data awal penelitian. Pada kesempatan tersebut

penulis sudah ikut secara langsung untuk melihat pengolahan gambir secara tradisional di lahan milik petani.

Pada awal bulan Juni 2024, penulis kemudian mengurus surat izin penelitian ke fakultas. Setelah surat izin selesai, peneliti melakukan perjalanan ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data sekunder di Kantor Wali Nagari Siguntur mengenai deskripsi lokasi penelitian. Penulis sekaligus meminta izin untuk melakukan penelitian di Nagari Siguntur. Melalui data yang didapatkan penulis mulai menggambarkan kondisi pertanian gambir yang diperoleh dari hasil wawancara bersama wali nagari. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data nagari dan data terkait program.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan tentang bagaimana kondisi sosial budaya petani dan kendala apa yang terjadi terhadap bantuan alat Kempa. Peneliti mewawancarai lima orang petani gambir dan satu orang tauke. Selain itu penulis juga mewawancarai bidan dan masyarakat biasa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman-pengalaman informan yang terlibat dalam bantuan alat Kempa, serta untuk data-data pendukung yang memperkuat hasil penelitian.

Penelitian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data terkait mekanisme pembentukan bantuan alat kempa.

Hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan selama peneliti mengumpulkan data, antara lain ketika penulis mewawancarai petani seringkali

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika mewawancarai tauke, mereka seakan tertutup menjawab pertanyaan dari penulis.

Proses pengumpulan data-data penelitian lebih kurang 3 bulan, penelitian ini berakhir tanggal 15 Agustus 2024. Pada masa penelitian, penulis juga berkunjung ke tempat alat kempa modern yang sudah tidak lagi beroperasi untuk pengolahan gambir dan beralih fungsi menjadi tempat huni satu keluarga.

